



BUPATI PAMEKASAN

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka kami telah memiliki pedoman operasional yang menjadi acuan dalam melaksanakan semua program dan kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempublikasikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2020 melalui beberapa media, antara lain; surat kabar, website : <http://www.keuanganpamekasankab.com/>, dan booklet serta media informasi lainnya.

Besar harapan kami semoga publikasi di website ini dapat menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong serta meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Pamekasan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pamekasan, 2 Nopember 2020



BUPATI PAMEKASAN

H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

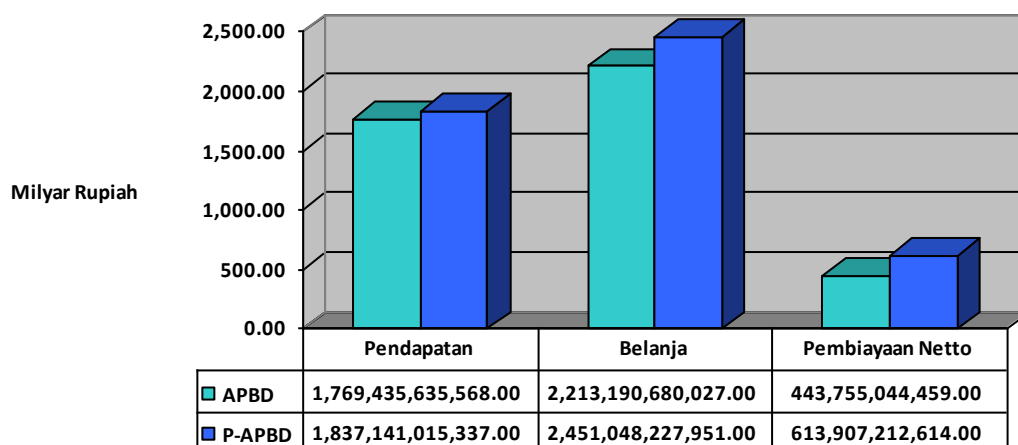
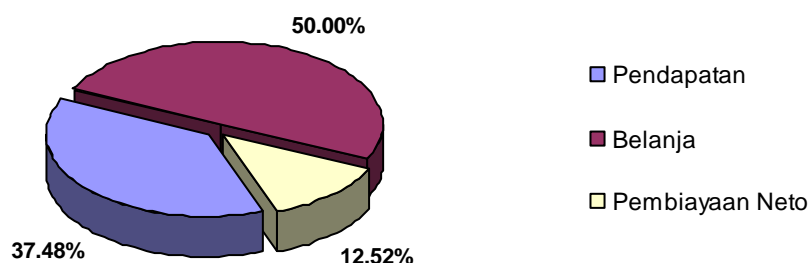
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2020

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam Perubahan APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor : 55 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

Gambar 1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020



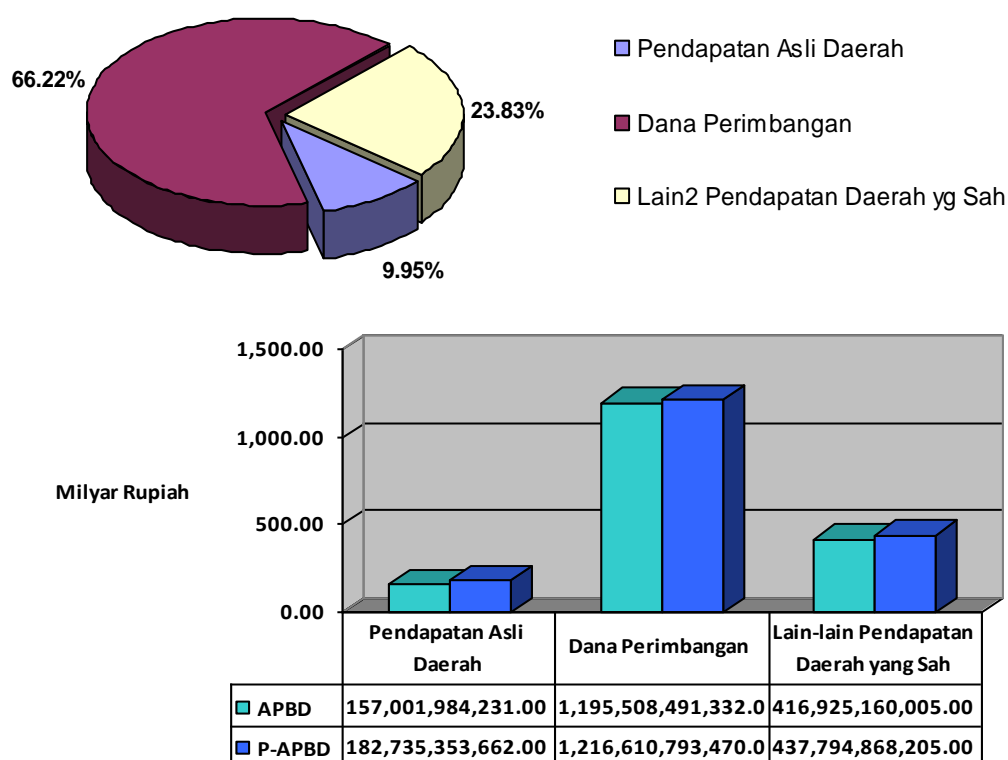
I. PENDAPATAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 setelah perubahan menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.837.141.015.337,00 atau naik 3,83% dari anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.769.435.635.568,00. Pendapatan ini direncanakan diperoleh dari :

| | |
|---|--|
| a. Pendapatan Asli Daerah sebesar | Rp. 182.735.353.662,00 |
| b. Dana Perimbangan sebesar | Rp. 1.216.610.793.470,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar | Rp. 437.794.868.205,00 |
| Jumlah | <u>Rp. 1.837.141.015.337,00</u> |

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :

Gambar 2. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2020 Setelah Perubahan



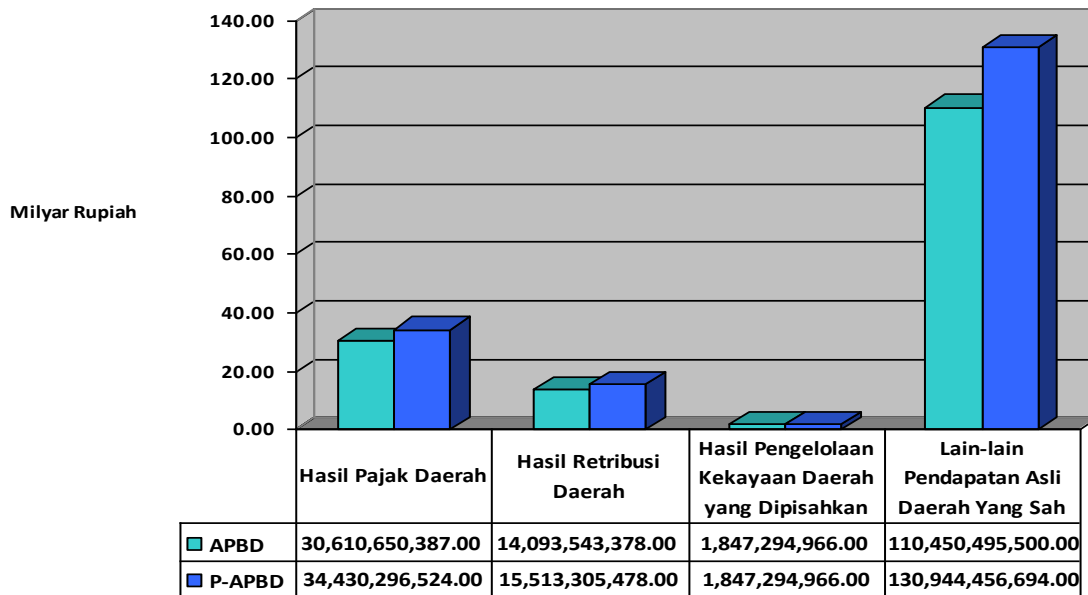
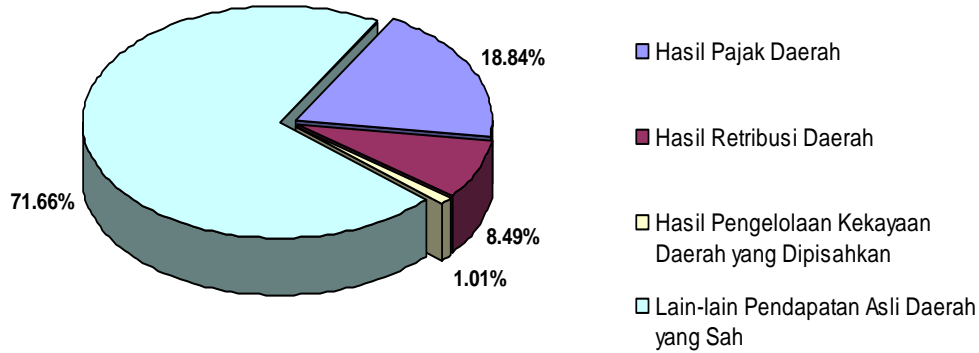
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.182.735.353.662,00 atau naik 16,39% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.157.001.984.231,00. Pendapatan ini terdiri dari :

| | |
|---|--------------------------------------|
| - Hasil Pajak Daerah sebesar | Rp. 34.430.296.524,00 |
| - Hasil Retribusi Daerah sebesar | Rp. 15.513.305.478,00 |
| - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar | Rp. 1.847.294.966,00 |
| - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar | Rp. 130.944.456.694,00 |
| Total Pendapatan Asli Daerah | <u>Rp. 182.735.353.662,00</u> |

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 3 berikut :

Gambar 3. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 Setelah Perubahan



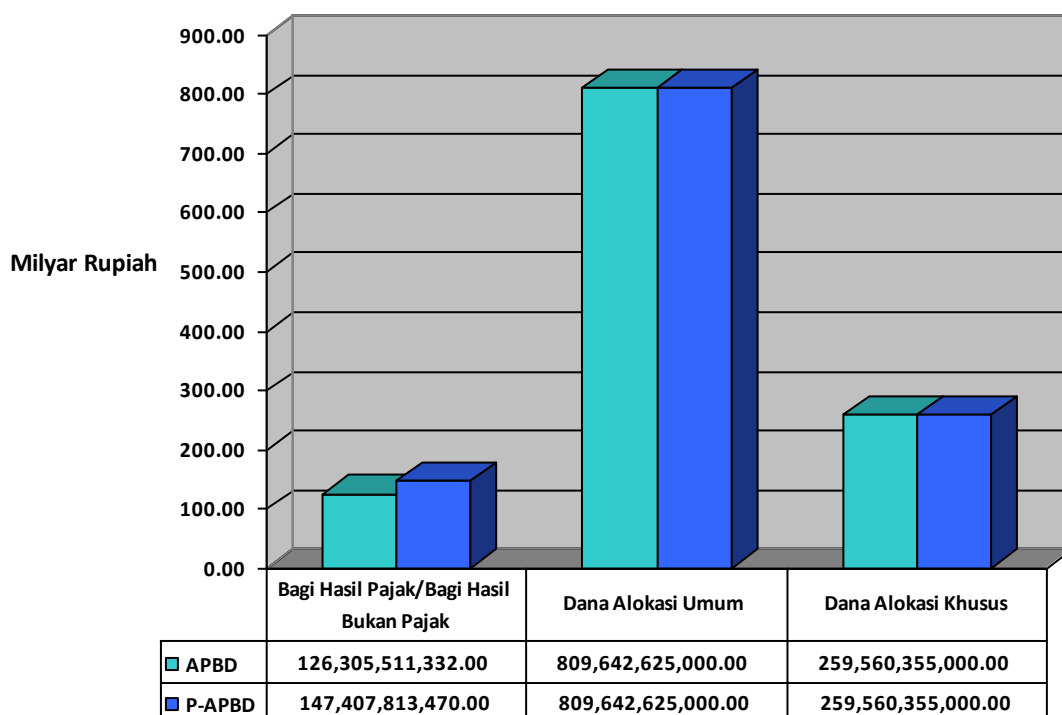
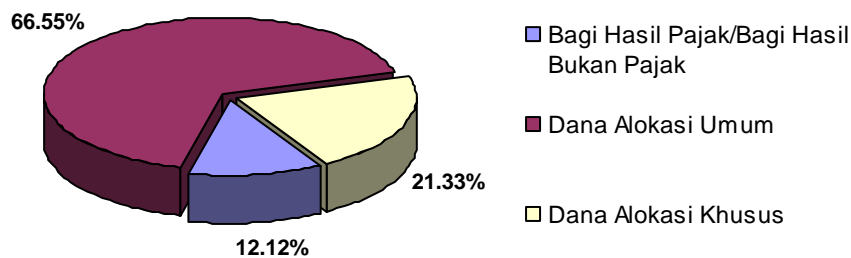
B. DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.1.216.610.793.470,00 atau naik 1,77% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.1.195.508.491.332,00 terdiri dari :

| | |
|---|--|
| - Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar | Rp. 147.407.813.470,00 |
| - Dana Alokasi Umum sebesar | Rp. 809.642.625.000,00 |
| - Dana Alokasi Khusus sebesar | Rp. 259.560.355.000,00 |
| Jumlah | <u>Rp. 1.216.610.793.470,00</u> |

Anggaran Dana Perimbangan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 4 berikut :

Gambar 4. Dana Perimbangan Tahun 2020 Setelah Perubahan



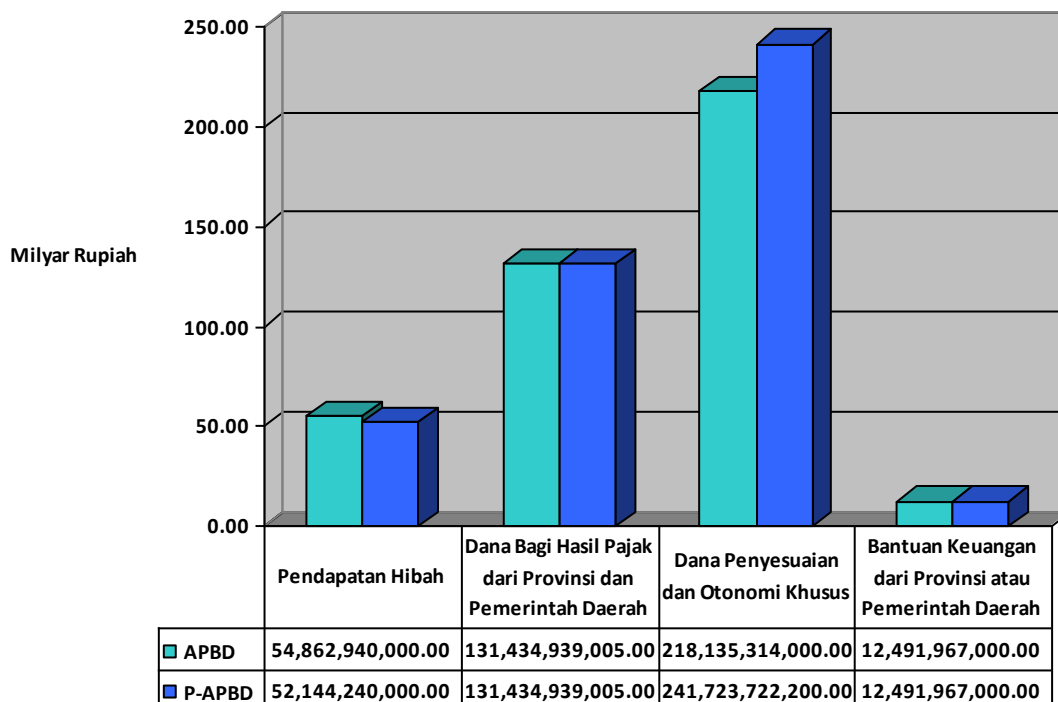
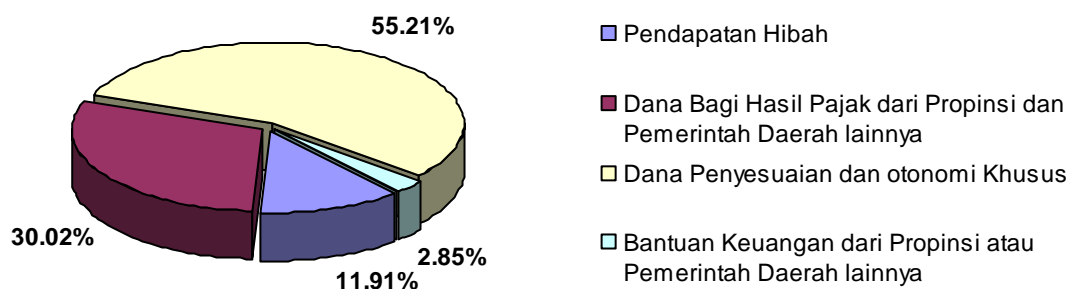
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.437.794.868.205,00 atau naik 5,01% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.416.925.160.005,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari :

| | |
|---|-------------------------------|
| - Pendapatan Hibah | Rp. 52.144.240.000,00 |
| - Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar | Rp. 131.434.939.005,00 |
| - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. 241.723.722.200,00 |
| - Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sebesar | Rp. 12.491.967.000,00 |
| Jumlah | Rp. 437.794.868.205,00 |

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 5 berikut :

Gambar 5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 Setelah Perubahan



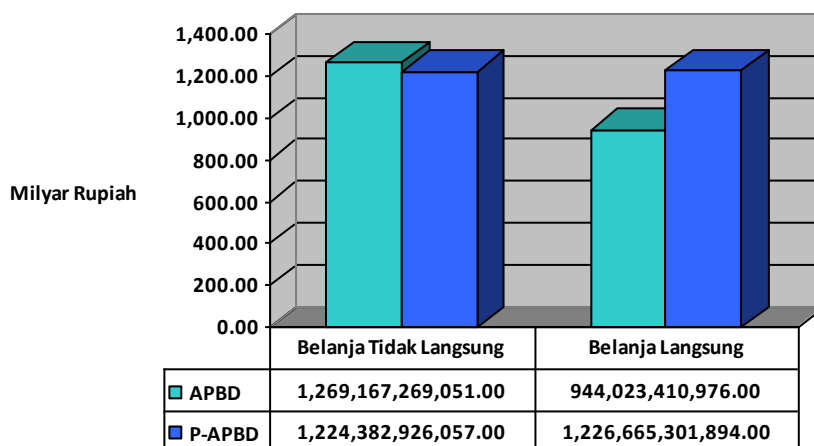
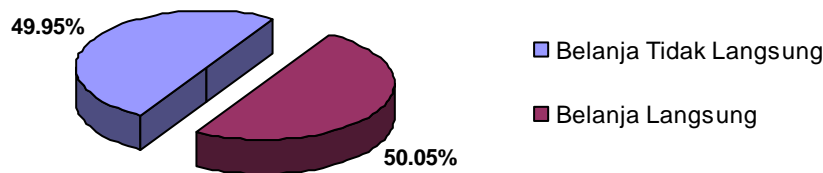
II. BELANJA DAERAH

Struktur Belanja Daerah menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 setelah perubahan diperkirakan sebesar Rp.2.451.048.227.951,00 atau naik 10,75% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.2.213.190.680.027,00. Belanja Daerah ini terdiri dari :

| | |
|---|---------------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sebesar | Rp. 1.224.382.926.057,00 |
| b. Belanja Langsung sebesar | Rp. 1.226.665.301.894,00 |
| Jumlah | Rp. 2.451.048.227.951,00 |

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 6 berikut :

Gambar 6 : Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 Setelah Perubahan



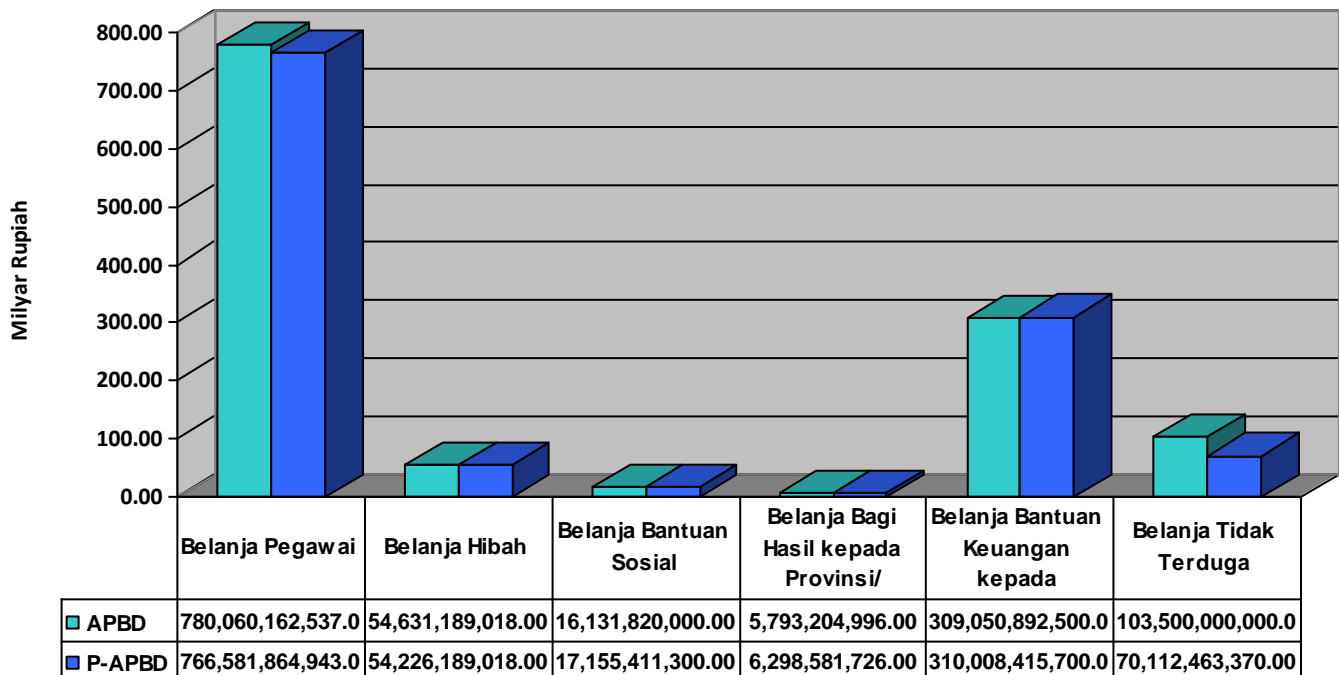
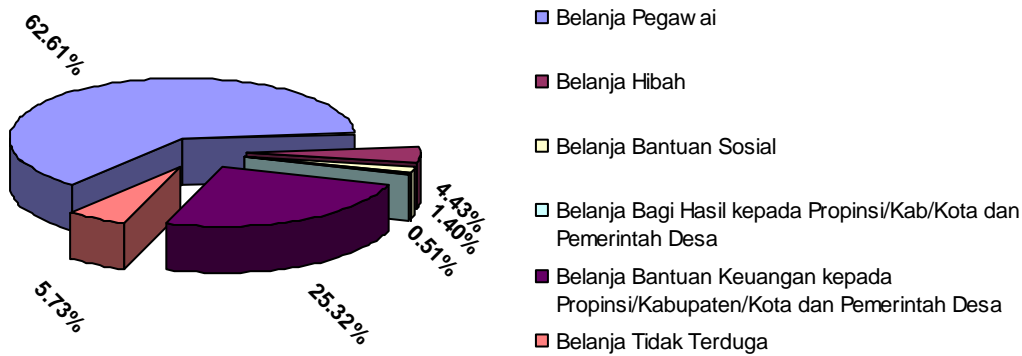
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja tidak langsung setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.1.224.382.926.057,00 atau turun 3,53% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.1.269.167.269.051,00. Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 766.581.864.943,00
- Belanja Hibah sebesar Rp. 54.226.189.018,00
- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 17.155.411.300,00
- Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 6.298.581.726,00
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 310.008.415.700,00
- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 70.112.463.370,00
- J u m l a h..... Rp. 1.224.382.926.057,00

Anggaran belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 setelah perubahan dapat dilihat pada gambar 7 berikut :

Gambar 7 : Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 Setelah Perubahan



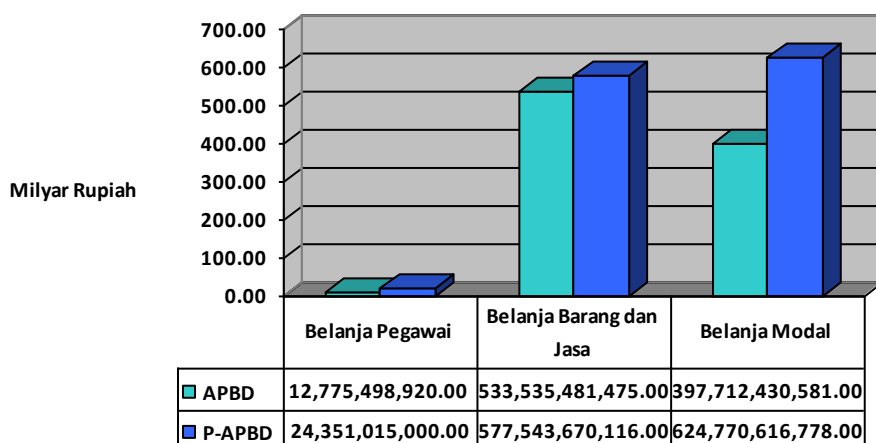
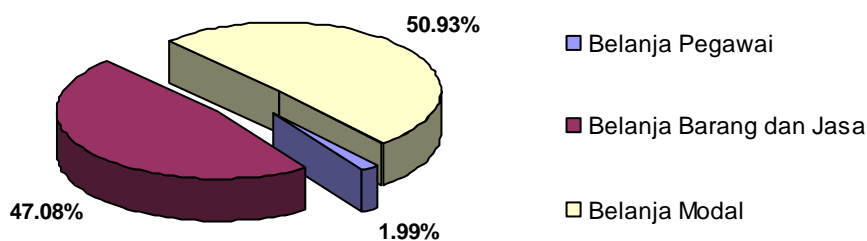
B. BELANJA LANGSUNG

Belanja Langsung setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.1.226.665.301.894,00 atau naik 29,94% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.944.023.410.976,00. Belanja langsung ini terdiri dari :

| | |
|---|--|
| - Belanja Pegawai sebesar | Rp. 24.351.015.000,00 |
| - Belanja Barang dan Jasa sebesar | Rp. 577.543.670.116,00 |
| - Belanja Modal sebesar | Rp. 624.770.616.778,00 |
| Jumlah | <u>Rp. 1.226.665.301.894,00</u> |

Anggaran Belanja Langsung Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 8 berikut :

Gambar 8 : Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020 Setelah Perubahan



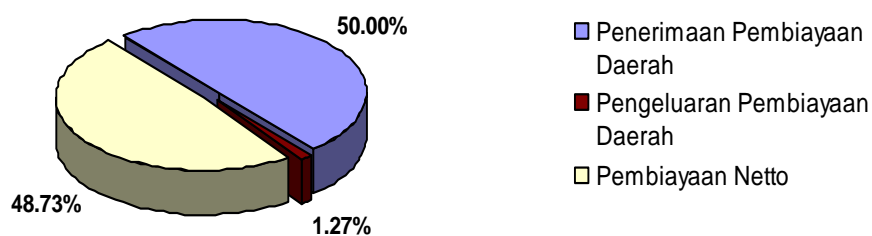
III. PEMBIAYAAN

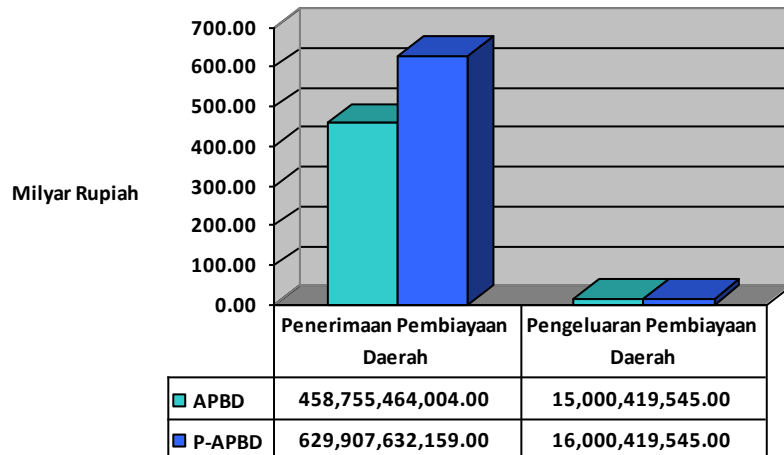
Dari seluruh perhitungan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah perubahan diperoleh defisit sebesar Rp.613.907.212.614,00. Defisit tersebut ditutupi dari pembiayaan netto dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|--|--------------------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar | Rp. 629.907.632.159,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar | (Rp. 16.000.419.545,00) |
| Pembiayaan Netto | <u><u>Rp. 613.907.212.614,00</u></u> |

Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 9 berikut :

Gambar 9. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020 Setelah Perubahan





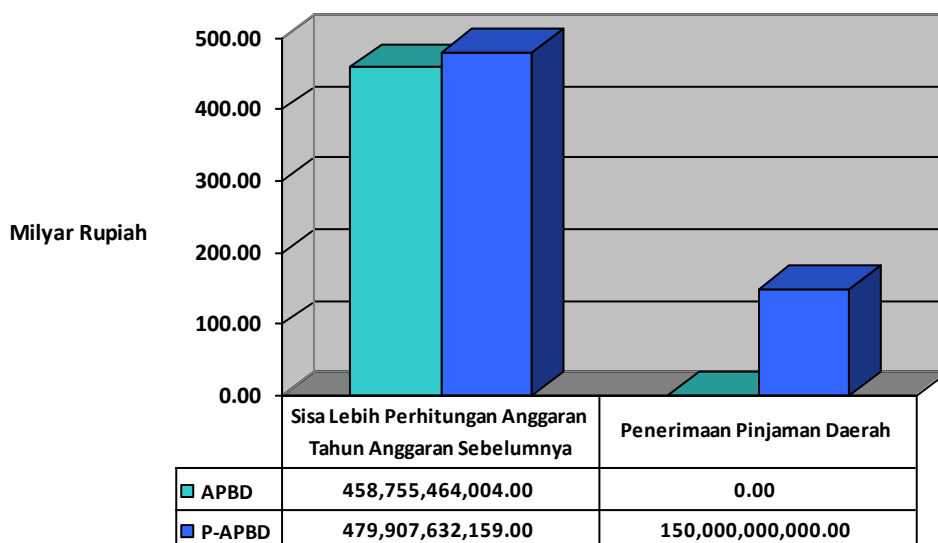
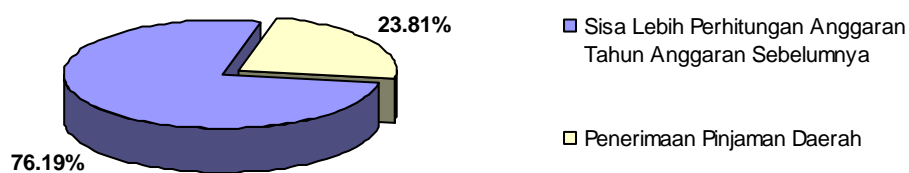
A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan dari sisi Penerimaan Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.629.907.632.159,00 atau naik 37,31% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.458.755.464.004,00. Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya sebesar Rp. 479.907.632.159,00
- Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 150.000.000.000,00
- J u m l a h Rp. 629.907.632.159,00**

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 10 berikut :

Gambar 10. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 Setelah Perubahan



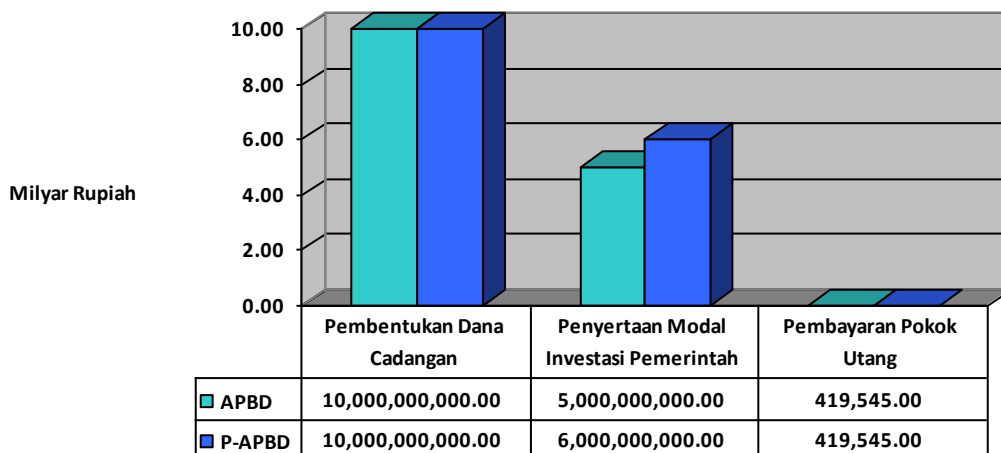
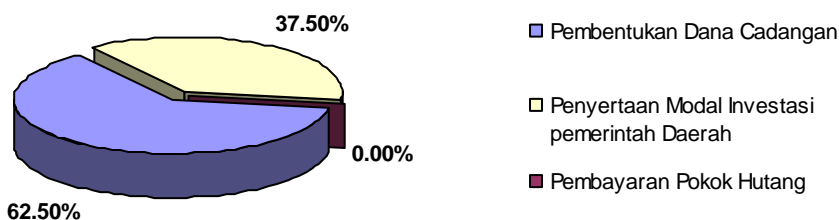
B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan dari sisi Pengeluaran Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.16.000.419.545,00 atau sama dengan anggaran sebelumnya. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari :

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| - Pembentukan Dana Cadangan sebesar | Rp. | 10.000.000.000,00 |
| - Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah sebesar | Rp. | 6.000.000.000,00 |
| - Pembayaran Pokok Utang sebesar..... | Rp. | 419.545,00 |
| J u m l a h | Rp. | 16.000.419.545,00 |

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 setelah perubahan dapat dilihat pada Gambar 11 berikut :

Gambar 11. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020 Setelah Perubahan



**RINGKASAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2020**

Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2020, Belanja Daerah dibagi menjadi 3 urusan pemerintahan yaitu Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan Urusan Penunjang dapat dirinci sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB

1. PENDIDIKAN

Anggaran belanja untuk urusan pendidikan Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.613.793.337.456,00 atau berkurang 1,32% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.621.982.580.476,00 pada Dinas Pendidikan.

Prioritas urusan pendidikan adalah Program Pendidikan Dasar (SD), Program Peningkatan Infrastruktur SD, Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Program Peningkatan Infrastruktur SMP, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Peningkatan Infrastruktur Anak Usia Dini, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2. KESEHATAN

Anggaran belanja untuk urusan kesehatan Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.381.893.307.283,00 atau bertambah 11,02% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.343.989.491.680,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|-------------------------------|
| - Dinas Kesehatan | Rp. 180.474.963.569,00 |
| - RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo | Rp. 184.157.160.374,00 |
| - RSUD Waru | Rp. 17.261.183.340,00 |
| J u m l a h | <u>Rp. 381.893.307.283,00</u> |

Prioritas urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan, Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan, dan Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan.

Prioritas urusan kesehatan pada RSUD dr.H.Slamet Martodirdjo adalah Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan,

Prioritas urusan kesehatan pada RSUD Waru adalah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Kemitraan Peningkatan pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Anggaran belanja untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.276.737.488.716,00 atau bertambah 152,59% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.109.558.895,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, Program Pengendalian Banjir, Program Penataan Ruang, dan Program Pembinaan Sosial Lingkup Pekerjaan Umum.

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Anggaran belanja untuk urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.172.576.417.221,00 atau bertambah 29.84% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.132.916.205.221,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah Program Pengembangan Perumahan, Program Penyehatan Lingkungan Kawasan Permukiman, Program Penataan bangunan dan lingkungan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Anggaran belanja untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.9.609.659.258,00 atau bertambah 6,14% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.9.053.795.088,00 pada Satuan Polisi Pamong.

Prioritas urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah, dan Program Partisipasi Kegiatan Kepamongprajaan.

6. SOSIAL

Anggaran belanja untuk urusan sosial Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.7.265.184.220,00 atau bertambah 14,94% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.6.320.864.220,00 pada Dinas Sosial.

Prioritas urusan sosial adalah Program Pengelolaan Areal Pemakaman, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

7. TENAGA KERJA

Anggaran belanja untuk urusan tenaga kerja Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.7.404.644.644,00 atau bertambah 2,07% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.7.254.644.644,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Prioritas urusan tenaga kerja adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Ketenagakerjaan.

8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.12.359.715.003,00 atau bertambah 9,80% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.11.256.532.003,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat, Program Pelayanan Keluarga Berencana, Program Pembangunan Ketahanan Keluarga, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri, dan Program Kesehatan Reproduksi Remaja.

9. PANGAN

Anggaran belanja untuk urusan pangan Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.8.917.155.592,00 atau bertambah 3,90% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.8.582.085.592,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

Prioritas urusan pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan), Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Populasi Ternak, Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, Program Pemberdayaan Penyuluhan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, Program Pemberdayaan Peternak, Program Peningkatan Pelayanan UPTD, Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Peternakan.

10. LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran belanja untuk urusan lingkungan hidup Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.29.918.415.952,00 atau berkurang 0,94% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.30.201.415.952,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.

Prioritas urusan lingkungan hidup adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan B3, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Pengendalian Polusi, Program Peningkatan Tata Lingkungan, Program Pemanfaatan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan, dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Lingkungan Hidup.

11. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Anggaran belanja untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.6.087.773.652,00 atau bertambah 16,94% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.5.206.085.092,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Program Pelayanan Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

12. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Anggaran belanja untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.41.551.462.950,00 atau bertambah 2,72% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.40.450.129.150,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Program Peningkatan tata Kelola Pemerintahan Desa, Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat, dan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan.

13. PERHUBUNGAN

Anggaran belanja untuk urusan perhubungan Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.24.309.401.091,00 atau bertambah 57,99% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.15.386.191.091,00 pada Dinas Perhubungan.

Prioritas urusan perhubungan adalah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program peningkatan pelayanan angkutan, Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum, dan Program Peningkatan Operasional Retribusi Parkir Berlangganan.

14. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Anggaran belanja untuk urusan komunikasi dan informatika Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.10.482.306.847,00 atau bertambah 5,51% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.9.935.020.997,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Prioritas urusan komunikasi dan informatika adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, Program Pengelolaan dan Pengembangan Data Elektronik, Program Pengelolaan Data Statistik, Program Penyediaan dan Pengendalian Infrastruktur TIK, Program Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi.

15. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Anggaran belanja untuk urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.4.977.616.650,00 atau bertambah 0,17%

dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.4.969.376.650,00 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha dan Pemasaran Bagi Usaha Mikro, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Program Peningkatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha, dan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro.

16. PENANAMAN MODAL

Anggaran belanja untuk urusan penanaman modal Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.7.472.523.256,00 atau bertambah 1,60% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.7.355.198.256,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Prioritas urusan penanaman modal adalah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Informasi, pengaduan dan Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal, Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

17. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Anggaran belanja untuk urusan kepemudaan dan olah raga Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.6.243.558.144,00 atau bertambah 13,00% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.5.525.258.144,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

Prioritas urusan kepemudaan dan olah raga adalah Program peningkatan peran serta kepemudaan, Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga dan Kepemudaan.

18. KEBUDAYAAN

Anggaran belanja untuk urusan kebudayaan Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.7.848.803.002,00 atau bertambah 3,97% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.7.549.303.002,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Prioritas urusan kebudayaan adalah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepariwisata, Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya, dan Program Pengembangan Destinasi Wisata.

19. PERPUSTAKAAN

Anggaran belanja untuk urusan perpustakaan Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.3.807.933.350,00 atau bertambah 3,27% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.3.687.433.350,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Prioritas urusan perpustakaan adalah Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kearsipan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan, Program Pelayanan Perpustakaan, Program Pembinaan, Pengembangan, Teknologi Informasi dan Promosi.

B. URUSAN PILIHAN

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Anggaran belanja untuk urusan kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.7.022.891.614,00 atau bertambah 4,85% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.6.697.891.614,00 pada Dinas Perikanan.

Prioritas urusan kelautan dan perikanan adalah Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, Program Pelayanan Usaha Informasi dan Kelembagaan Perikanan.

2. PERTANIAN

Anggaran belanja untuk urusan pertanian Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.19.505.345.830,00 atau bertambah 14,23% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.17.074.845.830,00 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Prioritas urusan pertanian adalah Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian / Perkebunan, Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan, dan Peningkatan Kualitas Bahan Baku.

3. PERDAGANGAN

Anggaran belanja untuk urusan perdagangan Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.24.325.486.395,00 atau bertambah 18,17% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.20.586.005.777,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Prioritas urusan perdagangan adalah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Pengembangan dan Pengelolaan Pasar, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial, dan Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

C. URUSAN PENUNJANG

1. PERENCANAAN

Anggaran belanja untuk urusan perencanaan Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.12.110.705.788,00 atau bertambah 15,11% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.10.521.143.988,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Prioritas urusan perencanaan adalah Program Pengembangan Data / Informasi, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program Fasilitas Pengelolaan Sumber Keuangan Pendukung Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Program

Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dan Program Pelaporan Pembangunan Daerah.

2. KEUANGAN

Anggaran belanja untuk urusan keuangan Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.532.822.843.619,00 atau berkurang 5,52% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.563.978.629.597,00 pada Badan Keuangan Daerah.

Prioritas urusan keuangan adalah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, Program Pengelolaan Penagihan dan Pelayanan Keberatan, Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah, Program Peningkatan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan, Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah.

3. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Anggaran belanja untuk urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.12.986.838.948,00 atau berkurang 4,09% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.13.540.115.548,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Prioritas urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan adalah Program Pendidikan Kedinasan, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Pengelolaan Mutasi Kepegawaian, Program Pengelolaan Kependidikan dan Kenaikan Gaji Berkala Kepegawaian, Program Peningkatan Pengembangan Karier, Program Peningkatan Kualitas Data dan Pengendalian Sumber Daya Aparatur.

4. PENGAWASAN

Anggaran belanja untuk urusan pengawasan Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.6.271.192.886,00 atau bertambah 7,00% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.5.861.192.886,00 pada Inspektorat.

Prioritas urusan pengawasan adalah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

5. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Anggaran belanja untuk urusan kesatuan bangsa dan politik Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.4.198.241.058,00 atau bertambah 5,19% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.3.990.941.058,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Prioritas urusan kesatuan bangsa dan politik adalah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program Kajian Strategis dan Kewaspadaan Nasional,

6. PENANGGULANGAN BENCANA

Anggaran belanja untuk urusan penanggulangan bencana Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.7.631.616.446,00 atau bertambah 13,09% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.6.748.486.446,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Prioritas urusan penanggulangan bencana adalah Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, Program Penanganan Kedaruratan dan Logistik, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pasca Bencana),

7. PEMERINTAHAN UMUM

Anggaran belanja untuk urusan pemerintahan umum Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.190.916.361.080,00 atau bertambah 4,32% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.183.010.920.709,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|-----|---------------------------|
| - Bupati dan Wakil Bupati | Rp. | 771.834.874,00 |
| - Sekretariat Daerah | Rp. | 73.920.148.240,00 |
| - Sekretariat DPRD | Rp. | 61.015.745.138,00 |
| - 13 Kecamatan se Kabupaten Pamekasan | Rp. | 55.208.632.828,00 |
| J u m l a h | Rp. | <u>190.916.361.080,00</u> |

Prioritas urusan pemerintahan umum pada Sekretariat Daerah adalah Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Program Pendukung Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah, Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat, Program Percepatan Reformasi Birokrasi, Program Fasilitasi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Program Peningkatan tertib Administrasi dan Kebijakan Pembangunan, Program Penataan Administrasi Pertanahan, Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Program Pengembangan dan Pengendalian Kinerja Perekonomian Daerah, Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah, Program peningkatan fasilitasi bantuan hukum, Program Peningkatan Kinerja Pembinaan Keagamaan dan Kemasyarakatan, Program Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pengembangan kerjasama, Program Peningkatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai.

Prioritas urusan pemerintahan umum pada Sekretariat DPRD adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan dan Layanan Aspirasi.

Sedangkan prioritas urusan pemerintahan umum pada Kecamatan adalah Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum, Program Pelayanan Administrasi Kecamatan, Program Pengembangan dan Pengendalian Kinerja Perekonomian Daerah.

Adapun ringkasan belanja tidak langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut :

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Tambah / (Kurang) |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | URUSAN WAJIB | 625,208,379,011.00 | 615,767,821,995.00 | (9,440,557,016.00) |
| 1.01 | PENDIDIKAN | 481,340,022,675.00 | 473,698,120,859.00 | (7,641,901,816.00) |
| 1.02 | KESEHATAN | 81,606,741,168.00 | 80,096,485,968.00 | (1,510,255,200.00) |
| 1.03 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6,907,586,648.00 | 6,907,586,648.00 | - |
| 1.04 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 2,576,207,950.00 | 2,576,207,950.00 | - |
| 1.05 | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 5,013,664,688.00 | 5,013,664,688.00 | - |
| 1.06 | SOSIAL | 3,165,067,020.00 | 3,165,067,020.00 | - |
| 1.07 | TENAGA KERJA | 2,972,712,644.00 | 2,972,712,644.00 | - |
| 1.08 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4,041,441,864.00 | 4,041,441,864.00 | - |
| 1.09 | PANGAN | 5,330,800,592.00 | 5,330,800,592.00 | - |
| 1.11 | LINGKUNGAN HIDUP | 9,180,036,850.00 | 8,892,036,850.00 | (288,000,000.00) |
| 1.12 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2,551,481,892.00 | 2,551,481,892.00 | - |
| 1.13 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3,035,911,768.00 | 3,035,911,768.00 | - |
| 1.15 | PERHUBUNGAN | 4,483,326,991.00 | 4,482,926,991.00 | (400,000.00) |
| 1.16 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2,710,658,447.00 | 2,710,658,447.00 | - |
| 1.17 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 2,758,156,650.00 | 2,758,156,650.00 | - |
| 1.18 | PENANAMAN MODAL | 1,517,351,668.00 | 1,517,351,668.00 | - |
| 1.19 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2,171,958,144.00 | 2,171,958,144.00 | - |
| 1.22 | KEBUDAYAAN | 1,448,208,002.00 | 1,448,208,002.00 | - |
| 1.23 | PERPUSTAKAAN | 2,397,043,350.00 | 2,397,043,350.00 | - |
| 2 | URUSAN PILIHAN | 21,694,169,096.00 | 21,694,169,096.00 | - |
| 2.01 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3,679,636,814.00 | 3,679,636,814.00 | - |
| 2.03 | PERTANIAN | 12,800,900,830.00 | 12,800,900,830.00 | - |
| 2.06 | PERDAGANGAN | 5,213,631,452.00 | 5,213,631,452.00 | - |
| 3 | URUSAN PENUNJANG | 622,264,720,944.00 | 586,920,934,966.00 | (35,343,785,978.00) |
| 3.01 | PERENCANAAN | 4,161,445,788.00 | 4,161,445,788.00 | - |
| 3.02 | KEUANGAN | 532,868,253,797.00 | 497,524,467,819.00 | (35,343,785,978.00) |
| 3.03 | KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 5,026,334,548.00 | 5,026,334,548.00 | - |
| 3.05 | PENGAWASAN | 2,800,505,886.00 | 2,800,505,886.00 | - |
| 3.06 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2,846,836,058.00 | 2,846,836,058.00 | - |
| 3.07 | PENANGGULANGAN BENCANA | 1,266,810,446.00 | 1,266,810,446.00 | - |
| 3.08 | PEMERINTAHAN UMUM | 73,294,534,421.00 | 73,294,534,421.00 | - |
| | J U M L A H | 1,269,167,269,051.00 | 1,224,382,926,057.00 | (44,784,342,994.00) |

Sedangkan ringkasan belanja langsung Kabupaten Pamekasan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut :

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Tambah / (Kurang) |
|----------|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | URUSAN WAJIB | 755,972,127,563.00 | 1,017,488,882,292.00 | 261,516,754,729.00 |
| 1.01 | PENDIDIKAN | 140,642,557,801.00 | 140,095,216,597.00 | (547,341,204.00) |
| 1.02 | KESEHATAN | 262,382,750,512.00 | 301,796,821,315.00 | 39,414,070,803.00 |
| 1.03 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 102,651,309,318.00 | 269,829,902,068.00 | 167,178,592,750.00 |
| 1.04 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 130,339,997,271.00 | 170,000,209,271.00 | 39,660,212,000.00 |
| 1.05 | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 4,040,130,400.00 | 4,595,994,570.00 | 555,864,170.00 |
| 1.06 | SOSIAL | 3,155,797,200.00 | 4,100,117,200.00 | 944,320,000.00 |
| 1.07 | TENAGA KERJA | 4,281,932,000.00 | 4,431,932,000.00 | 150,000,000.00 |
| 1.08 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 7,215,090,139.00 | 8,318,273,139.00 | 1,103,183,000.00 |
| 1.09 | PANGAN | 3,251,285,000.00 | 3,586,355,000.00 | 335,070,000.00 |
| 1.11 | LINGKUNGAN HIDUP | 21,021,379,102.00 | 21,026,379,102.00 | 5,000,000.00 |
| 1.12 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2,654,603,200.00 | 3,536,291,760.00 | 881,688,560.00 |
| 1.13 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 37,414,217,382.00 | 38,515,551,182.00 | 1,101,333,800.00 |
| 1.15 | PERHUBUNGAN | 10,902,864,100.00 | 19,826,474,100.00 | 8,923,610,000.00 |
| 1.16 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 7,224,362,550.00 | 7,771,648,400.00 | 547,285,850.00 |
| 1.17 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 2,211,220,000.00 | 2,219,460,000.00 | 8,240,000.00 |
| 1.18 | PENANAMAN MODAL | 5,837,846,588.00 | 5,955,171,588.00 | 117,325,000.00 |
| 1.19 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 3,353,300,000.00 | 4,071,600,000.00 | 718,300,000.00 |
| 1.22 | KEBUDAYAAN | 6,101,095,000.00 | 6,400,595,000.00 | 299,500,000.00 |
| 1.23 | PERPUSTAKAAN | 1,290,390,000.00 | 1,410,890,000.00 | 120,500,000.00 |
| 2 | URUSAN PILIHAN | 22,664,574,125.00 | 29,159,554,743.00 | 6,494,980,618.00 |
| 2.01 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3,018,254,800.00 | 3,343,254,800.00 | 325,000,000.00 |
| 2.03 | PERTANIAN | 4,273,945,000.00 | 6,704,445,000.00 | 2,430,500,000.00 |
| 2.06 | PERDAGANGAN | 15,372,374,325.00 | 19,111,854,943.00 | 3,739,480,618.00 |
| 3 | URUSAN PENUNJANG | 165,386,709,288.00 | 180,016,864,859.00 | 14,630,155,571.00 |
| 3.01 | PERENCANAAN | 6,359,698,200.00 | 7,949,260,000.00 | 1,589,561,800.00 |
| 3.02 | KEUANGAN | 31,110,375,800.00 | 35,298,375,800.00 | 4,188,000,000.00 |
| 3.03 | KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 8,513,781,000.00 | 7,960,504,400.00 | (553,276,600.00) |
| 3.05 | PENGAWASAN | 3,060,687,000.00 | 3,470,687,000.00 | 410,000,000.00 |
| 3.06 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1,144,105,000.00 | 1,351,405,000.00 | 207,300,000.00 |
| 3.07 | PENANGGULANGAN BENCANA | 5,481,676,000.00 | 6,364,806,000.00 | 883,130,000.00 |
| 3.08 | PEMERINTAHAN UMUM | 109,716,386,288.00 | 117,621,826,659.00 | 7,905,440,371.00 |
| | J U M L A H | 944,023,410,976.00 | 1,226,665,301,894.00 | 282,641,890,918.00 |

Sebagai tambahan informasi terkait dengan anggaran bidang pendidikan selama 5 Tahun, mulai Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel berikut :

| TAHUN | BIDANG PENDIDIKAN | BIDANG LAIN | TOTAL ANGGARAN | PROSEN |
|-------|--------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 2016 | 665.151.809.916,00 | 1.490.855.738.973,00 | 2.156.007.548.889,00 | 30,85% |
| 2017 | 642.984.098.615,40 | 1.395.128.119.793,60 | 2.038.112.218.409,00 | 31,55% |
| 2018 | 640.935.098.379,00 | 1.497.192.464.185,00 | 2.138.127.562.564,00 | 29,98% |
| 2019 | 686.258.108.315,00 | 1.707.535.081.711,00 | 2.393.793.190.026,00 | 28,67% |
| 2020 | 613,793,337,456.00 | 1,837,254,890,495.00 | 2,451,048,227,951.00 | 25,04% |

Gambar 12. Anggaran Bidang Pendidikan Tahun 2016 s.d. 2020 (dalam milyar rupiah)

